



**LAPORAN KEGIATAN KOMISI VI DPR RI  
DALAM MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022  
Tanggal 1 November – 9 Januari 2022  
(Masa Sidang Mulai Tanggal 1 November – 16 Desember 2021  
Dan Masa Reses Mulai Tanggal 17 Desember – 9 Januari 2022)  
Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI  
Tanggal 13 September 2021**

---

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 adalah sebagai berikut:

### **I. FUNGSI LEGISLASI**

Terkait dengan fungsi Legislasi, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

- a. Rapat Intern Panja RUU dan NA BUMN Komisi VI DPR RI tanggal 8 November 2021 pukul 13.00-selesai, yaitu membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) masing-masing Fraksi dan lain-lain.
- b. Rapat Intern Panja Penyusunan RUU dan Naskah Akademik tentang BUMN pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 09.00-12.00 yaitu membahas mengenai catatan akhir Fraksi terkait Draft RUU dan Naskah Akademik tentang BUMN.
- c. Rapat Intern Komisi VI DPR RI tanggal 14 Desember 2021 dengan acara Laporan Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN. Selanjutnya Komisi VI DPR RI menyetujui terhadap Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN untuk diserahkan ke Badan Legislasi DPR RI untuk di harmonisasi

tanpa ada catatan-catatan dari Fraksi. Adapun tanggapan Fraksi-fraksi akan disampaikan pada Rapat Paripurna.

d. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 10.00 – 13.00 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI sepakat terkait Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (*Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, RCEP*) pengesahannya akan dilakukan dengan Undang-Undang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 84 ayat (3) huruf a. karena berdampak akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
2. Komisi VI DPR RI sepakat terkait Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Republic of Korea, IK-CEPA*) pengesahannya akan dilakukan dengan Undang-Undang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 84 ayat (3) huruf a. karena berdampak akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
3. Komisi VI DPR RI menilai rencana pengesahan Persetujuan Perdagangan Jasa Antara Negara Anggota ASEAN (*ASEAN Trade in Services Agreement, ATISA*) akan secara teknis memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara mikro dan makro, sehingga ratifikasi persetujuan tersebut akan dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan sosialisasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha nasional, setelah Peraturan Presiden mengenai Perdagangan Jasa Antara Negara Anggota ASEAN (*ASEAN Trade in Services Agreement, ATISA*) disahkan dan berlaku.
5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk mengkonsultasikan setiap tahapan dalam perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional agar kepentingan nasional dapat diperjuangkan secara optimal.
6. Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan untuk konsisten menerapkan kebijakan terkait harga eceran tertinggi minyak goreng.

**Catatan dari Nusron Wahid (A-302):**

Dalam kestabilan harga minyak goreng saat ini, Pemerintah sebaiknya tidak menggunakan dana yang dikelola BPDPKS.

- e. Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 13.00-15.00 yaitu mengenai laporan Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN, Laporan Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN dan lain-lain.

**II. FUNGSI ANGGARAN**

Terkait dengan fungsi anggaran, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 Komisi VI DPR RI tidak melaksanakan kegiatan tersebut.

**III. FUNGSI PENGAWASAN**

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

- a. Rapat Pimpinan pada tanggal 2 November 2021 pukul 21.00 – selesai, yaitu membahas Program Kerja Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022 dan lain-lain.

- b. Rapat Intern Kapoksi Komisi VI DPR RI pada tanggal 3 November 2021 pukul 13.00 – 15.00, yaitu membahas Penetapan program kerja Komisi VI DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022.
- c. Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 3 November 2021 pukul 15.00- 16.00, yaitu melanjutkan Penetapan program kerja Komisi VI DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022.
- d. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 9 November 2021 pukul 10.00–13.00 dengan BUMN Farmasi dengan pembahasan implementasi keputusan tarif tertinggi pemeriksaan real time PCR/Anti gen, Progress program vaksinasi nasional dan lain-lain dengan :
  - 1. PT Biofarma (Persero)
  - 2. PT Kimia Farma, Tbk
  - 3. PT Indofarma, Tbk dan
  - 4. PT Phapros, Tbk

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Mendesak PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Phapros Tbk untuk mengupayakan agar harga PCR dan antigen yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Supaya dapat menggerakkan aktivitas ekonomi dibidang transportasi, akomodasi dan pariwisata serta aktivitas lainnya.
- b. Mendesak PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Phapros Tbk bekerjasama dengan Pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan kebutuhan riil jumlah vaksin yang dibutuhkan serta tepat distribusi sehingga dapat mendukung target vaksinasi untuk masyarakat yang masuk kriteria wajib vaksinasi.
- c. Mendesak PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Phapros Tbk untuk melakukan riset dan pengembangan inovasiterkait obat Covid-19 serta memproduksi obat-obatan, vitamin ataupun kebutuhan medis lainnya dalam mengantisipasi lonjakan Covid-19 gelombang ketiga, sehingga tidak terjadi kelangkaan seperti sebelumnya.
- d. Mendorong PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk dan seluruh BUMN untuk dapat melakukan program vaksinasi gratis dan gerai PCR di seluruh

- jaringan apotik dan kliniknya untuk mempercepat program vaksinasi nasional dan menuntaskan pandemi Covid-19
- e. Mendorong BUMN kesehatan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk terus mengkampanyekan pentingnya vaksinasi dalam mengatasi pandemi.
  - f. Memberikan waktu kepada PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Phapros Tbk untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
- e. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN dan menghadirkan Wamen II BUMN II dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 10 November 2021 pukul 13.30-selesai yaitu membahas mengenai restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- 1. Komisi VI DPR RI mendukung Pemerintah untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan prioritas tanpa menggunakan APBN.
  - 2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN melaporkan dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan pesawat dan penunjukan lessor kepada penegak hukum dengan didahului audit investigasi oleh BPK/BPKP.
  - 3. Komisi VI DPR RI memberikan jangka waktu selama 1 (satu) tahun kepada Kementerian BUMN untuk menyelesaikan restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
  - 4. Komisi VI DPR RI akan membahas pembentukan Panja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam rapat internal Komisi VI DPR RI.
  - 5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk terus melaporkan progress restrukturisasi utang kepada Komisi VI DPR RI.
- f. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 10 November 2021 yaitu membahas mengenai Progress IPO anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk dan PT Dayamitra Telekomunikasi/Mitratel, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI mendukung PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dalam proses *Initial Public Offering* (IPO) PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dalam rangka meningkatkan *value* dan nilai perusahaan.
  2. Komisi VI DPR RI mendorong PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) agar segera mendapatkan Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK sebelum proses *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia.
  3. Komisi VI DPR RI mendorong PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) menjadi perusahaan tower terbesar di Indonesia dan menjadi yang terbaik di industri menara, infrastruktur digital dan jaringan telekomunikasi dalam rangka membangun ketahanan nasional guna menyongsong tantangan masa depan.
  4. Komisi VI DPR RI mendukung PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) agar berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam rangka mempersiapkan infrastruktur spektrum untuk persiapan jaringan 5G.
  5. Komisi VI DPR RI meminta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) untuk memperbaiki kualitas jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia, termasuk mendukung BAKTI meningkatkan layanan di daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan).
  6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
- g. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Antam Tbk yatu membahas Perkembangana Kinerja PT Antam, Tbk dengan kesimpulan sebagai berikut :
1. Komisi VI DPR RI meminta PT ANTAM Tbk agar segera menyelesaikan proyek strategis terkait hilirisasi terutama pabrik feronikel dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), termasuk progress penyediaan listrik, dengan menyampaikan jadwal yang jelas dalam jawaban tertulis.

2. Komisi VI DPR RI mendesak agar PT ANTAM Tbk meningkatkan produksi tambang yang cenderung menurun.
  3. Komisi VI DPR RI mendorong PT ANTAM Tbk untuk segera meningkatkan cadangan stok yang saat ini sangat minim, terkait deposit nikel, emas, bauksit baik melalui eksplorasi maupun penambahan lahan (IUP).
  4. Komisi VI DPR RI meminta PT ANTAM Tbk untuk meningkatkan peran dalam pengembangan infrastruktur industri mobil listrik nasional.
  5. Komisi VI DPR RI mendorong PT ANTAM Tbk agar keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, serta dapat menciptakan sebuah ekosistem perekonomian baru bagi masyarakat, khususnya di lingkungan tempat beroperasinya PT ANTAM Tbk sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
  6. Komisi VI DPR RI meminta PT ANTAM Tbk untuk lebih meningkatkan kinerja operasional dan keuangannya melalui roadmap dan *bussiness plan* baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sehingga menjadikan PT ANTAM Tbk sebagai sebuah perusahaan tambang terbaik di Indonesia.
  7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT ANTAM Tbk untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
- h. Rapat Panja BUMN Energi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada tanggal 13 Desember 2021 yaitu untuk mendengarkan penjelasan terhadap struktur Organisasi PT Pertamina Persero dan anak perusahaan, dengan kesimpulan sebagai berikut :
1. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) terkait struktur organisasi PT Pertamina (Pesero) dan anak perusahaan.
  2. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Pertamina (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI.
  3. Dalam rapat Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI berikutnya akan mengundang:

- a. PT PLN (Persero) terkait langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan terkait target dari Pemerintah di bidang ekonomi hijau (*green energy*).
  - b. Mind ID terkait langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan terkait target dari Pemerintah di bidang ekonomi hijau (*green energy*).
  - c. Anak perusahaan hulu dan hilir PT Pertamina (Persero).
- i. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wamen II BUMN II pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 16.00-18.00 yaitu pembahasan mengenai rencana Restrukturisasi PT Barata Indonesia (Persero), dengan kesimpulan sebagai berikut :
1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian BUMN dalam proses restrukturisasi PT Barata Indonesia (Persero) melalui jalur PKPU yang bertujuan memberikan perlindungan kepada BUMN agar dapat kembali mengembangkan bisnisnya.
  2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN senantiasa memperhatikan kondisi supplier atau vendor BUMN mengingat sebagian besar supplier adalah pelaku usaha UMKM yang juga mempunyai peran yang besar dalam pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Diharapkan proses PKPU PT Barata Indonesia (Persero) tidak menyebabkan penurunan kualitas kredit supplier kepada perbankan.
  3. Komisi VI DPR RI mendukung langkah penyelesaian supplier PT Barata Indonesia (Persero) yang dibiayai oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sesuai dengan koridor yang telah diputuskan dalam PKPU yaitu melalui novasi pembiayaan supplier kepada PT Barata Indonesia (Persero).
  4. Komisi VI DPR RI mendukung proses diskusi *business to business* yang berkelanjutan antara PT Jamkrindo Syariah dan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai bagian dari perbaikan ekosistem pembiayaan supplier di lingkungan BUMN.
  5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN agar mengawal penyelesaian proses novasi SCF supplier PT Barata Indonesia (Persero) sesuai dengan jadwal yang disampaikan pada Komisi VI pada rapat kerjahari ini.



**A. KONSINYERING DALAM MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022**

- a. Panja RUU dan Naskah Akademik tentang BUMN pada tanggal 16-18 November 2021 di Hotel Ritz Carlton.
- b. Panja RUU dan Naskah Akademik tentang BUMN pada tanggal 26-28 November 2021 di Hotel Ayana Mid Plaza.
- c. Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN dengan mengundang Direktur Utama PPA dan Danareksa pada tanggal 6-8 Desember 2021 di Hotel Sultan Jakarta.
- d. Panja RUU dan Naskah Akademik tentang BUMN pada tanggal 9-11 Desember 2021 di Hotel Ayana Jakarta.

**B. KUNJUNGAN SPESIFIK DALAM MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022**

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dan mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI, Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19-21 November 2021 telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke 3 daerah yaitu :
  - a. PT Pertamina Patra Niaga, Cilegon
  - b. Perum Bulog, Cirebon
  - c. PT Jamkrindo dan PT ITDC Mandalika, Lombok NTB
2. Pada tanggal 22-24 November 2021 telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke 3 daerah yaitu :
  - a. PT Pertamina Kilang RU IV, Cilacap
  - b. BRI, dukungan BRI terhadap UMKM melalui program BRllian Preneur di Yogyakarta
  - c. BNI, dukungan BNI terhadap UKM melalui program Xpora di Solo Jawa Tengah.

**C. KUNJUNGAN KERJA DALAM MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG  
2021-2022**

1. Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dan mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI, Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 melaksanakan Kunjungan Kerja Panja dan FGD RUU BUMN ke Perguruan Tinggi dengan provinsi sebagai berikut:
  - a. Kunjungan Kerja Panja II Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN ke PT INTI, Bandung Jawa Barat. tanggal 3 s.d. 5 Desember 2021;
  - b. Kunjungan Kerja Panja II Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN ke PT Kawasan Industri Wijayakusuma, Semarang Jawa Tengah tanggal 3 s.d. 5 Desember 2021;
2. Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dan mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI, Komisi VI DPR RI dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi sebagai berikut:
  - a. Kota Batam, Kepulauan Kepri tanggal 17 s.d 21 Desember 2021;
  - b. Kota Surakarta, Jawa Tengah tanggal 17 s.d 21 Desember 2021;
  - c. Kota Surabaya, Jawa Tengah tanggal 17 s.d 21 Desember 2021;

**IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 – 2022.

Jakarta, 20 Desember 2021  
**KABAGSET KOMISI VI DPR RI,**

**TTD.**

**DEWI RESMINI, S.E., M.Si NIP.**

**19710407 199203 2 001**